

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil temuan di Bab V. Berdasarkan hasil temuan tersebut penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan-kecenderungan, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program secara umum belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program P4GN tersebut.
 - a. Dilihat dari Komunikasi, yaitu berkaitan dengan pemahaman maksud dan tujuan stranas, sosialisasi, sasaran kebijakan strategi nasional P4GN, telah dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana program di BNP dan BNK/Kota.
 - b. Dilihat dari Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan strategi nasional P4GN (SDM, dana, sarana prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai/belum mendukung suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN.
 - c. Dilihat dari Struktur Birokrasi, dari temuan pada bab hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis menunjukkan adanya dukungan suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN.
 - d. Dilihat dari Kecenderungan, dari temuan pada bab hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis ternyata mendukung suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN.

- e. Dilihat dari Hubungan Antar Organisasi, dari temuan pada bab hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis menunjukkan adanya dukungan untuk suksesnya implementasi strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota
 - f. Dilihat dari Pelaksanaan Program, dari temuan pada bab hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis ternyata mendukung suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota adalah :
- a. Faktor Komunikasi
 - 1) Mekanisme pelaksanaan program P4GN di BNP dan BNK/Kota masih dirasakan kurang baik dalam pelaksanaannya.
 - 2) Petunjuk pelaksanaan program P4GN yang telah dibuat BNN dirasakan masih kurang dalam penerapannya.
 - 3) Masih adanya personil BNP dan BNK/Kota yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan program P4GN.
 - b. Dilihat dari Variabel Sumberdaya
 - 1) Jumlah SDM di BNP dan BNK/Kota masih belum memadai untuk melaksanakan program P4GN. Hal ini dikarenakan masih banyaknya SDM di BNP dan BNK/Kota yang mempunyai jabatan rangkap.
 - 2) Kualitas SDM di BNP dan BNK/Kota masih belum memadai. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki SDM di BNP dan BNK/Kota masih sangat kurang.
 - 3) SDM di BNP dan BNK/Kota belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan program P4GN.
 - 4) Dukungan dana/anggaran khusus untuk melaksanakan program P4GN di BNP dan BNK/Kota masih kurang.
 - 5) Dukungan sarana prasarana di BNP dan BNK/Kota masih kurang memadai.

c. Dilihat dari Variabel Struktur Birokrasi

- 1) Kelembagaan BNP dan BNK/Kota masih banyak yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 belum tegas dan belum cukup kuat untuk dijadikan pegangan oleh BNP dan BNK/Kota. Terutama dalam hal status kelembagaan yang masih bersifat non struktural dan juga bukan lembaga vertikal. Dalam hal pendanaan kegiatan operasional di BNP dan BNK/Kota dibebankan ke APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, sehingga masih adanya peluang penolakan dari legislatif (DPRD) jika anggaran operasional BNP dan BNK/Kota diusulkan dalam APBD karena pembentukan struktur kelembagaan BNP maupun BNK/Kota hanya didasarkan pada peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.
- 3) BNN tidak dapat melaksanakan fungsi komando kepada BNP dan BNK/Kota karena tidak adanya hubungan secara struktural dan secara finansial BNP dan BNK/Kota tidak tergantung dari pusat. Dengan demikian BNN sebagai badan yang menangani pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat pusat tidak dapat mengintervensi kegiatan-kegiatan BNP dan BNK/Kota.

d. Dilihat dari Variabel Kecenderungan

- 1) Masih rendahnya dukungan komitmen politis dan operasional Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program P4GN di wilayahnya masing-masing.
- 2) Peran Pemerintah Daerah belum optimal dalam melaksanakan program P4GN di wilayah masing-masing.

e. Faktor Hubungan Antar Organisasi

Hubungan koordinasi instansi Polri dan Pemda masih kurang solid.

f. Faktor Pelaksanaan Program

Beberapa BNP dan BNK/Kota hanya melakukan kegiatan ketika menjelang peringatan hari anti narkoba internasional (HANI) tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

6.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Untuk BNN :
 - a. Agar meningkatkan SKEP Stranas BNN dari Surat Keputusan Ketua BNN menjadi Peraturan Presiden.
 - b. Dalam penyusunan stranas seharusnya melibatkan BNP dan BNK/Kota sehingga BNP dan BNK/Kota dapat mengimplementasikan stranas P4GN tersebut ke dalam program-program masing-masing BNP dan BNK/Kota yang disesuaikan dengan karakteristik daerah-daerah masing-masing.
 - c. Pada implementasi program P4GN, perlu adanya koordinasi dan sosialisasi yang terus menerus agar tercapai kesamaan intepretasi dan kesamaan persepsi terhadap program P4GN antara BNN, BNP dan BNK/Kota.
2. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota :
 - a. Perlunya mensinkronisasi Perpres 83 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007, Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri No : 061/566/SJ tanggal 6 Maret 2008 agar kedudukan BNP dan BNK/Kota diatur dalam sebuah Peraturan Daerah dan menjadi salah satu organisasi perangkat daerah.
 - b. Perlu adanya komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota serta Legislatif (DPRD Provinsi dan Kab/Kota) dalam bentuk dukungan anggaran/dana operasional melalui APBD, penyediaan SDM yang terlatih serta sarana prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program P4GN di BNP dan BNK/Kota dapat berjalan.
3. Untuk BNP dan BNK/Kota, agar membentuk satuan tugas operasional yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah serta dilengkapi dengan Sekretariat Tetap yang didukung dengan personil tetap (tidak rangkap jabatan) dan anggaran yang jelas.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.